



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

CALK

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KOTA PONTIANAK**



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut adalah melalui Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didalamnya mencakup pembinaan dan pengawasan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta tata cara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Maka materi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016 berbasis Akrual. Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Semoga dengan materi laporan keuangan yang telah meliputi 5 (lima) hal tersebut diatas dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) khususnya yang berkaitan dengan transparan dan akuntabilitas.

Demikian Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019 di susun agar dapat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pontianak, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PONTIANAK

Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	12
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	16
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	18
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD	19
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	20
5.1 Pendapatan	20
5.2 Belanja	20
5.3 Neraca	25
5.4 Ekuitas	27
5.2 Persediaan.....	28
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	30
BAB VII PENUTUP	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di unit kerja Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepada Daerah pada pasal 5 disebutkan bahwa pertanggung jawaban akhir tahun anggaran adalah merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra OPD.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Jo PP 105 Tahun 2000) Pasal 101 disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada pasal 232 ayat (6) menyatakan Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Laporan Operasional (LO)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Tujuan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi, yang dalam hal ini adalah pihak legislatif, lembaga pengawasan, pemeriksa, pemerintah dan masyarakat secara luas.

Selain tersebut diatas, peran aktif dari penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah dapat menggambarkan beberapa hal, antara lain :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada unit SKPD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan

SKPD pada Kepala Daerah dalam hal ini Bidang Pelaporan dan Akuntansi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak setiap bulannya.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan OPD serta mempermudah pengendalian yang efektif atas sebuah asset, hutang dan Ekuitas dana.

c. Transparasi

Menyediakan informasi keuangan pemerintah yang transparan serta terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan di OPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016, meliputi :

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
- 10) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019;
- 11) Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018;
- 12) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2018;
- 13) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- 14) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPD)
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pemerintah Kota Pontianak menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,80-6,60 persen akan tercapai. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar itu, maka Kota Pontianak membutuhkan investasi yang cukup besar, yang tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga dari pihak swasta.

Data Pemerintah Kota Pontianak, mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,99 persen, dan untuk target tahun 2020 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diharapkan bisa mencapai 5,2 persen.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak untuk menarik investasi masuk ke Pontianak, yakni dengan kemudahan proses perizinan serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kebutuhan investasi tersebut. Inflasi Kota Pontianak tahun 2015 adalah sebesar 6,17 persen, dan tahun 2016 melambat menjadi 3,88 persen. Kemudian pada tahun 2018 melambat kembali menjadi 3,86 persen," ungkapnya.

Ia menambahkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak menurut usaha ADHK tahun 2016 mencapai Rp21,81 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Pontianak tahun 2016 meningkat sebanyak Rp1,06 triliun, atau dengan kata lain, kenaikan volume ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Pontianak tumbuh sebesar 5,10 persen.

Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan basis perekonomian di Kota Pontianak selama tiga tahun terakhir, yang dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB menurut usaha ADHB, di mana sektor perdagangan besar dan eceran, seperti reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peranan terbesar terhadap total PDRB dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 18,61 persen, katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Pontianak pada Desember 2018 terjadi inflasi 1,28 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 143,74 pada November 2018 menjadi 145,58 pada Desember 2018. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2018 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2018) sama, yaitu sebesar 3,99 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok pengeluaran.

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks dari yang tertinggi secara berurutan yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

4,43 persen; kelompok bahan makanan 1,61 persen; kelompok sandang 0,48 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,43 persen; kelompok kesehatan 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,15 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,01 persen.

Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk tahun 2015 – 2019 mengacu kepada visi dan misi Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019, yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Visi dan misi Kota Pontianak sebagai dasar Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan langkah strategis dalam pengelolaan bidang urusan informasi dan komunikasi di Kota Pontianak. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2015 – 2019 adalah sebagai **“Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak Berbasis E-Government”**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menyadari bahwa keberadaannya dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota Pontianak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terwujudnya sektor pelayanan publik melalui pelayanan informasi pengaduan masyarakat sehingga dapat melalui sistem online yang menjadi gaya hidup masyarakat modern, memberikan solusi bagi masyarakat menerima layanan yang lebih cepat, transparan, mudah dan sederhana serta siap menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media pengaduan yang telah tersedia.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahun 2015 – 2019, sasaran ini merupakan pewujudan dalam mencapai tujuan jangka menengah pada urusan bidang komunikasi, informatika dan statistik dalam masa 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Government.
3. Mewujudkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan. Dalam pencapaian realiasi program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun anggaran 2019 dengan jumlah target Pagu anggaran keseluruhan setelah perubahan sebesar Rp. 15.340.985.340,- terealisasi sebesar Rp. 13.303.133.119,00 atau 86,7%. Untuk melihat lebih jelas kinerja program kerja tahun anggaran 2019 sebagaimana tersaji pada tabel di baeah ini.

Tabel.1

Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Sasaran/Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.355.083.040,00	1.231.488.721,00	90,88%
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Kantor	1.523.701.080,00	1.281.922.460,00	84,13%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.500.000,00	72.670.000,00	76,89%
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	78.650.000,00	78.621.100,00	99,97%
5	Program Peningkatan Disiplin Dan Kinerja Aparatur	54.420.000,00	47.474.000,00	87,23%
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	24.800.000,00	21.196.100,00	85,47%
7	Program Peningkatan Pelayanan Prima	17.450.000,00	16.746.100,00	95,97%

No	Sasaran/Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
8	Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	3.749.132.320,00	3.346.189.665,00	89,34%
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	629.408.000	452.864.500	71,95%
10	Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	2.302.993.900,00	1.869.271.163,00	81,17%
11	Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	650.154.000,00	631.148.700,00	97,08%
12	Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	718.185.000,00	710.451.200,00	98,92%
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	556.770.000,00	373.392.797,00	67,06%
14	Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	101.374.000,00	87.738.100,00	86,55%

No	Sasaran/Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	JUMLAH	15.340.985.340,00	13.303.133.119,00	86,74%

2.2. Kebijakan Keuangan

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan keuangan diawali dengan proses penyusunan kebijakan umum APBD yang tertuang dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) yang disusun berdasarkan Musrenbang berupa rencana kerja tahunan. Setelah KUA tersusun maka akan dialokasikan dana dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang lebih dikenal dengan PPAS. Berpedoman pada PPAS inilah setiap SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya setelah pembahasan antara legeslatif dan eksekutif, maka tersusunlah APBD yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mencakup ruang lingkup Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung tahun anggaran 2019 setelah perubahan sebagaimana tabel 2.

Tabel. 2

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kota Pontianak

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA	15.340.985.340,00	13.303.133.119,00	86,71%
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.484.364.000,00	3.081.958.513,00	92,00%
511	Belanja Pegawai	3.484.364.000,00	3.081.958.513,00	92,00%
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.161.000.000,00	1.957.937.513,00	90,60%
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.620.000.000,00	1.506.165.768,00	92,97%
5110102	Tunjangan Keluarga	150.000.000,00	127.222.906,00	84,82%
5110103	Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	152.590.000,00	95,37%
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	50.000.000,00	42.155.000,00	84,31%
5110106	Tunjangan Beras	80.000.000,00	68.364.480,00	85,46%
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000,00	7.249.990,00	36,25%
5110108	Pembulatan Gaji	1,000,000.00	23.029,00	1,90%
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	50.000.000,00	41.827.257,00	83,66%
5110123	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	30.000.000,00	12.339.083,00	41,13%
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.323.364.000,00	1.124.021.000,00	84,94%
5110205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan	1.033.498.000,00	878.065.000,00	84,96%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	Prestasi Kerja			
5110208	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	289.866.000,00	245.956.000,00	84,85%
52	BELANJA LANGSUNG	11.856.621.340,00	10.221.174.606,00	86,21%
I	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.148.604.120,00	2.750.118.481,00	87,34%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.355.083.040,00	1.231.488.721,00	90,88%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	6.245.000,00	83,27%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	63.500.000,00	34.817.596,00	54,83%
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.754.320,00	89.740.500,00	99,98%
1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.110.000,00	61.146.550,00	64,29%
1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	8.764.900,00	73,04%
1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.213.600,00	8.930.000,00	96,92%
1.7	Penyediaan Makanan dan	55.360.000,00	49.635.500,00	89,66%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	Minuman			
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	271.360.000,00	271.358.627,00	99,99%
1.9	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	180.944.400,00	142.289.000,00	78,64%
1.10	Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah	5.000.000,00	4.630.000,00	92,60%
1.11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	444.560.000,00	436.195.000,00	98,11%
1.12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	120.780.720,00	117.736.048,00	97,48%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.523.701.080,00	1.281.922.460,00	84,13%
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27.449.600,00	8.467.000,00	30,85%
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	112.500.000,00	90.320.000,00	80,28%
2.3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	268.830.000,00	265.280.000,00	98,68%
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung	27.449.600,00	8.467.000,00	30,84%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	Kantor			
2.5	Pengadaan Mebeleur	102.660.000,00	101.095.200,00	98,48%
2.6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	832.305.480,00	732.079.860,00	87,96%
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	94.500.000,00	72.670.000,00	76,90%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.180.000,00	2.300.000,00	9,92%
3.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Apartur	71.320.000,00	70.370.000,00	98,67%
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	78.650.000,00	78.621.100,00	99,96%
4.1	Penyusunan Rencana kerja	48.100.000,00	48.083.600,00	99,97%
4.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	30.550.000,00	30.537.500,00	99,96%
5	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	54.420.000,00	47.474.000,00	87,23%
5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	54.420.000,00	47.474.000,00	87,23%
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	24.800.000,00	21.196.100,00	85,49%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	KEUANGAN			
6.1	Penyusunan Laporan Keuangan	24.800.000,00	21.196.100,00	85,49%
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	17.450.000,00	16.746.100,00	95,97%
7.1	Survey Kepuasan Masyarakat dan Penyusunan Dokumen IKM	17.450.000,00	16.746.100,00	95,97%
II	Sasaran Meningkatnya implementasi daerah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Government			
8	PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3.749.132.320,00	3.346.189.665,00	89,25%
8.1	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	60.790.000,00	24.791.000,00	40,78%
8.2	Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah	87.948.000,00	57.600.000,00	65,49%
8.3	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive	249.800.000,00	227.239.100,00	90,97%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	Center			
8.4	Operasional LPSE Kota Pontianak	291.379.000,00	221.084.000,00	75,88%
8.5	Operasional Pontive Center Kota Pontianak	531.294.320,00	488.293.070,00	91,91%
8.6	Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center	197.230.000,00	189.909.850,00	96,29%
8.7	Bimbingan dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center	99.230.000,00	66.589.000,00	67,11%
8.8	Evaluasi Laporan Pengaduan Pontive Center	24.520.000,00	22.415.000,00	91,42%
8.9	Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak	239.135.000,00	200.250.300,00	83,74%
8.10	Operasional Co Worker Space (Incubator Room)	216.796.000,00	183.480.275,00	84,63%
8.11	Pengadaan Aplikasi Penunjang Pontianak Smart City	291.630.000	270.455.000,00	92,74%
8.12	Peningkatan Ruangan Server dan Kelengkapannya	1.205.640.000,00	1.157.796.500,00	96,03%
8.13	Layanan Call Center	97.990.000,00	88.850.570,00	90,67%
8.14	Pembuatan Masterplan IT	165.750.000,00	147.436.000,00	88,95%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN BERBASIS E-	2.302.993.900,00	1.869.271.163,00	81,17%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	GOVERNMENT			
9.1	Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan	244.200.000,00	135.596.064,00	55,53%
9.2	Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan	49.900.000,00	42.919.500,00	86,01%
9.3	Pengelolaan Website Kota Pontianak	137.840.000,00	121.045.500,00	87,82%
9.4	Operasional dan Maintenance Perangkat Server	1.447.083.900,00	1.205.862.599,00	83,33%
9.5	Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak	306.020.000,00	258.774.500,00	84,56%
9.6	Monitoring dan Evaluasi SPBE	92.550.000,00	80.174.000,00	86,63%
9.7	Pengelolaan Website Kelurahan	25.400.000,00	24.899.000,00	98,03%
10	PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	101.374.000,00	87.738.100,00	86,55%
10.1	Pengembangan Tata Kelola Persandian dan Pengamanan Informasi	101.374.000,00	87.738.100,00	86,55%
10.2	Aplikasi Persandian (Tanda Tangan Digital)	0	0	0
III	Sasaran Mewujudkan			

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	<i>kualitas informasi pembangunan</i>			
11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	629.408.000,00	452.864.500,00	71,95%
11.1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Parisipasi Pameran/Expo	159.000.000,00	74.417.300,00	46,80%
11.2	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi	45.800.000,00	41.730.000,00	91,11%
11.3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	54.284.000,00	45.930.000,00	84,61%
11.4	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	263.716.000,00	185.244.300,00	70,24%
11.5	Perlombaan Film Pendek Kebijakan Pemerintah	106.608.000,00	105.542.900,00	99,00%
12	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	556.770.000,00	373.392.797,00	67,06%
12.1	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian	128.500.000,00	67.949.500,00	52,88%
12.2	Pembuatan Materi Promosi dan Sosialisasi Pontianak	428.270.000,00	305.443.297,00	71,32%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
	Smart City			
VI	Sasaran Mewujudkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak			
13	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL KOTA PONTIANAK	650.154.000,00	631.148.700,00	97,08%
13.1	Updating Data Dasar Statistik Sektoral	157.840.000,00	156.556.750,00	99,19%
13.2	Forum Data Kota Pontianak	138.440.000,00	137.429.950,00	99,27%
13.3	Bimtek, Sosialisasi dan Pendampingan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	47.474.000,00	40.792.450,00	85,93%
13.4	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Ekonomi Pembangunan	159.200.000,00	152.174.550,00	95,59%
13.5	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya	147.200.000,00	144.195.000,00	97,96%
14	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PEMBANGUNAN	718.185.000,00	710.451.200,00	98,92%
14.1	Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak	135.300.000,00	135.287.900,00	99,99%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (LS/TU/GU)	%
1	2	3	4	5
14.2	Penyusunan Profil Kota Pontianak	130.465.000,00	129.740.000,00	99,44%
14.3	Satu (One) data Untuk Pembangunan	167.840.000,00	166.335.500,00	99,10%
14.4	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	284.580.000,00	279.087.800,00	98,07%
	JUMLAH	15.340.985.340,00	13.303.133.119,00	86,71%

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh bidang-bidang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program dan kegiatan kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan Anggaran dalam DPA Tahun 2019 setelah perubahan dengan total pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.484.364.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.081.958.513,- atau 88,45% dan untuk Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.856.621.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.221.174.606,- atau 86,21% serta dengan total seluruh belanja langsung dan tak langsung sebesar Rp 15.340.985.340,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 13.303.133.119,00 atau 86,71%.

Berikut ini disajikan Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel. 3

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan
Belanja Tak Langsung Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kota Pontianak Tahun 2019

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak langsung	3.484.364.000,00	3.081.958.513,00	88,45%
2	Belanja Langsung	11.856.621.340,00	10.221.174.606,00	86,21%
Total Belanja Langsung dan Tak Langsung		15.340.985.340,00	13.303.133.119,00	86,71%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan menampilkan laporan ringkasan pengelolaan keuangan yang menjadi tugas pokok serta fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Dalam laporan pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang besumber sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa DPA Diskominfo Kota Pontianak tahun 2019 dengan rencana dan realisasi anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam rincian (LRA) Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019 dengan pengelolaan anggaran sebagai berikut :

- a. **Pendapatan**, berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak mengelola pendapatan sehingga laporan LRA pada tahun 2019 sehingga pendapatan pada kolom anggaran dan realisasi sebesar Rp. 0,-
- b. **Belanja**, dalam LRA tahun 2019 pada pos belanja terbagi menjadi dua jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja Operasi terdiri dari (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) dengan total anggaran belanja oprasional sebesar Rp. 11.577.973.860,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.843.222.259,- atau 85,01%.; 2) Belanja Modal yang terdiri dari (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Lainnya) total belanja modal dengan anggaran sebesar Rp. 3.763.011.480,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.459.910.860,- atau 91,95%.

Dari iktisar diatas dapat dilihat bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019 pada

belanja operasi dan belanja modal dikategorikan **baik** ini dapat terlihat dari besaran capaian realisasi 86,74% untuk melihat lebih jelas realisasi anggaran tersebut, dapat dilihat pada lampiran dan tabel 4.

Tabel. 4

Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.2	Belanja Pegawai	3.623.308.400,00	3.182.247.513,00	87,83
2.3	Belanja Barang dan Jasa	7.954.665.460,00	6.660.974.746,00	83,74
	Jumlah Belanja Operasi	11.577.973.860,00	9.843.222.259,00	85,01
3	BELANJA MODAL			
3.1	Belanja Tanah	0	0	0
3.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.969.191.480,00	2.714.981.460,00	91,44
3.3	Belanja Gedung dan Bangunan	210.200.000,00	209.475.000,00	99,66
3.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3.6	Belanja Aset Lainnya	583.620.000,00	535.454.400,00	91,75
	Jumlah Belanja Modal	3.763.011.480,00	3.459.910.860,00	91,95
	JUMLAH BELANJA	15.340.985.340,00	13.303.133.119,00	86,71
	SURPLUS/DEFISIT	15.340.985.340,00	13.303.133.119,00	86,71

3.1.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional (LO) dalam pengelolaan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019 yang terdiri dari pos – pos operasional sebagai berikut :

- a. **Pendapatan**, dalam laporan operasional terdiri dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak mengelola pendapatan sehingga laporan operasional pada tahun 2019 sehingga pos pendapatan pada kolom anggaran dan realisasi sebesar Rp. 0,-
- b. **Beban**, dalam laporan operasional tahun 2019 pada pos beban terbagi menjadi tiga jenis sub beban yang terdiri dari : **1) Beban Operasi** dengan total anggaran sebesar Rp. 12174269533,44, yang terdiri dari *Beban Pegawai* dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.206.305.513,00 dan *Beban Barang dan Jasa* dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 6.662.592.692,58 dan untuk Beban Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Penyusutan sebesar Rp. 2.303.126.327,86. Penyisihan Piutang dan lain –lain tidak terdapat anggaran atau Rp. 0,- dan untuk tahun 2018 jika di dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan belanja Operasional dengan total kenaikan sebesar Rp. 1.215.816.679,07 atau 111,09. **2) Surplus non operasional** tahun 2019 yang terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dalam laporan operasional tahun 2019 tidak terdapat jumlah surplus non operasional. **3). Defisit Non Operasional** dalam laporan operasional terdapat 3 (tiga) pos yang terdiri dari pos Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dari ketiga pos tersebut tidak terdapat jumlah Defisit Non Operasional sebesar Rp. 0,-.

Dari ikhtisar laporan operasional diatas dapat dilihat bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019, jumlah beban operasi tahun 2019 sebesar Rp.

12.174.269.533,44 atau meningkat sebesar Rp. 1.215.86.679,07 atau 111,09%. Untuk melihat perkembangan laporan oprasional dapat di lihat pada lapiran dan tabel. 5 di bawah ini.

Tabel. 5

Laporan Operasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

NO	URAIAN	2019	2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0
1.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	Jumlah Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
2	BEBAN				
2.1	BEBAN OPERASI				
2.1.1	Beban Pegawai	3.206.305.513,00	3.170.257.801,00	36.047.712,00	101,14
2.1.2	Beban Barang dan Jasa	6.659.103.992,58	6.010.891.551,00	648.212.441,58	110,78
2.1.3	Beban Bunga	0	0	0	0
2.1.4	Beban Subsidi	0	0	0	0
2.1.5	Beban Hibah	0	0	0	0
2.1.6	Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
2.1.7	Beban Penyusutan	2.303.126.327,86	1.777.303.502,37	525.822.825,49	129,59

2.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
2.1.9	Beban Lain-lain	2.245.000,00	0	2.245.000,00	0
	Jumlah Beban Operasi	12.174.269.533,44	10.958.452.854,37	1.215.816.679,07	111,09
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.174.269.533,44)	(10.958.452.854,37)	(1.215.816.679,07)	111,09
3	SURPLUS NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5.374.375,00	(5.374.375,00)	0
	Jumlah Surplus Non Operasional	0	5.374.375,00	(5.374.375,00)	0
4	DEFISIT NON OPERASIONAL				
	Jumlah Defisit Non Operasioanl	0	0	0	0
	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	5.374.375,00	(5.374.375,00)	0
	SURPLUS / DEFISIT - LO	12.174.269.533,44	10.953.078.479,37	1.221.191.054,07	111,15

3.1.3. Neraca

Dalam tahun anggaran 2019 neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang terdiri dari :

- a. Aset dalam neraca tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp8.089.048.942,32 terjadi peningkatan 111,56% dari tahun 2018 dengan nilai aset Rp. 6.992.538.656,78 yang terdiri dari : **1). Aset Lancar** dengan nilai total tahun 2019 sebesar Rp. 136.349.828,42 yang terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp. 1.870.753,42 dan persediaan bahan/material sebesar Rp. 134.479.075,- nilai asset lancar ini merupakan persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu *media center Kodim*; **2). Aset Tetap** tahun 2019 dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp. 6.985.968.807,65 dimana asset tetap ini terdiri dari *peralatan dan mesin* dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.966.694.735,67 dan *bangunan gedung tempat kerja dan bangunan menara* dengan jumlah total sebesar Rp. 6.454.922.000,00 serta akumulasi penyusutan sebesar Rp. - 8.435.647.928,02; dan **3). ,Aset Lainnya** dengan jumlah nilai Rp. 966.730.306,25. Nilai asset pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.992.538.656,78 terjadi peningkatan nilai asset lainnya tahun 2019 menjadi senilai Rp. 8.089.048.942,32 atau 115,68%.
- b. Kewajiban dalam neraca tahun 2019 terdapat nilai sebesar Rp. 86.066.000,00,- ini terjadi karena adanya utang belanja pegawai terhadap tambahan penghasilan atas prestasi kerja berupa kesejahteraan pegawai (*kespeg*) serta isentif dan makan dan minum pada bulan Desember. Selain itu untuk terdapat utang pembayaran internet (*Belanja Jasa komunikasi*) untuk bulan Januari sebesar Rp. 3.488.700,00 yang menjadi kewajiban diakhir tahun 2019. Sehingga total kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 89.554.700,00.
- c. Ekuitas tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.999.494.242,32 yang terdiri dari ekuitas sebesar Rp. - 5.243.738.876,68 dan RK PPKD sebesar Rp. 25.697.120.726,00 peningkatan ekuitas ini, sejalan dengan perkembangan peningkatan anggaran dari tahun 2018 dan 2019.

Untuk melihat perkembangan neraca tahun 2018 dan tahun 2019 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada lapiran dan tabel. 6 di bawah ini.

Tabel. 6

Neraca

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	2019	2018	%
1	2	3	4	5
1	ASET			

1.1	ASET LANCAR			
	Kas dan Setara Kas	-	59.900.000,00	-
	Beban Dibayar Dimuka	1.870.753,42	-	-
	Persediaan	134.479.075,00	134.479.075,00	-
	Jumlah Aset Lancar	136.349.828,42	194.379.075,00	70,15%
1.2	ASET TETAP			
	Peralatan dan Mesin	8.966.694.735,67	6.325.586.275,67	141,75%
	Gedung dan Bangunan	6.454.922.000,00	6.173.819.000,00	104,55%
	Akumulasi Penyusutan	-8.435.647.928,02	-6.574.859.331,39	-128,30%
	Jumlah Aset Tetap	6.985.968.807,65	5.924.545.944,28	117,92%
1.3	ASET LAINNYA			
	Aset Tak Berwujud	966.230.306,25	873.113.637,50	110,72%
	Aset Lain-lain	21.497.500,00	21.497.500,00	100%
	Jumlah Aset Lainnya	966.730.306,25	873.613.637,50	110,66%
	RK SKPD	-	-	0,00%
	JUMLAH ASET	8.089.048.942,32	6.992.538.656,78	115,68%
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			0,00%
	Utang Belanja Pegawai	86.066.000,00	62.008.000,00	138,80%
	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.488.700,00	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	89.554.700,00	62.008.000,00	144,42%
	JUMLAH KEWAJIBAN	89.554.700,00	62.008.000,00	144,42%
2.2	EKUITAS			0,00%
	Ekuitas	-5.243.738.876,68	-5.523.356.950,22	94,87%
	RK PPKD	25.697.120.726,00	12.453.887.607,00	206,34%

	JUMLAH EKUITAS	7.999.494.242,32	6.930.530.656,78	115,42%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.089.048.942,32	6.992.538.656,78	115,68%

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas LPE

Dalam anggaran tahun 2019 Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan ekuitas awal sebesar Rp. 6.930.530.656,78 dengan surplus/deficit-LO sebesar Rp. -12.174.269.533,44 serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0 dan selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0 serta lain – lain tahun 2019 sebesar Rp. -0,02. Untuk ekuitas akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 7.999.494.242,32 atau meningkat dari Tahun 2018 sebesar Rp. 1.068.963.585,54. Untuk RK PPKD tahun 2019 senilai Rp. 13.243.233.119,00 atau meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp. 789.345.512,00. Maka akuntabilitas ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp. 7.999.494.242,32. Untuk lebih jelas melihat LPE tahun 2019 per 31 Desember 2019 sebagaimana di tampilkan pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel. 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	2019	2018
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	6.930.530.656,78	2.057.603.300,01
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.174.269.533,44)	(10.953.078.479,37)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	197.423.492,36

6	LAIN LAIN	(0,02)	3.174.694.736,78
7	RK PPKD	13.243.233.119,00	12.453.887.607,00
8	EKUITAS AKHIR	7.999.494.242,32	6.930.530.656,78

3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diklasifikasikan pada Bidang dan Sub Bidang sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, terdapat beberapa permasalahan yang bersifat intern maupun ekstern antara lain:

1. Adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, dimana salah satu seksi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dipindahkan ke Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan kondisi penganggaran masih melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini menyebabkan tidak dapat direalisasikannya anggaran yang tersedia karena pemindahan tersebut dilakukan setelah anggaran perubahan.
2. Untuk pembayaran langganan akses internet melalui salah satu vendor baru dapat dibayarkan pada bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019, dimana selama bulan Januari – Agustus 2019 akses internet diberikan secara gratis. Hal ini menyebabkan kurangnya realisasi anggaran pada kegiatan tersebut.
3. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika,
4. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya,
5. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika karena terbatasnya kompetensi serta belum optimalnya etos kerja.
6. Belum seluruhnya OPD di lingkungan pemerintah Kota Pontianak menggunakan aplikasi e-government.

Upaya solusi dalam pemecahan masalah yang dapat di laksanakan pada tahun 2019 tersebut antara lain:

1. Melakukan usulan perubahan nomenklatur SOTK perangkat daerah di akhir tahun anggaran;
2. Segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat dilakukan realisasi anggaran sesuai dengan jumlah belanja disisa waktu penganggaran. Untuk tahun selanjutnya pada belanja internet dapat dilakukan pelelangan mulai akhir tahun sebelum tahun penggaran yang bersangkutan.
3. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di *up date*;
4. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat umum;

5. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Kota Pontianak dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, Majalah);
6. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di OPD dan masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek);
7. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan peningkatan kompetensi KIM dengan berbasis IT;
8. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan serta mengidentifikasinya sebagai upaya solusi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi JEPIN;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selaku OPD menerapkan Entitas Akuntansi mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab XI Pasal 232 Ayat (1) Entitas Akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Sistem Akuntansi yang dilaksanakan meliputi serangkaian prosedur dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah basis kas dan basis akrual. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Basis Kas yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). **Basis Akrual** yang berlaku pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan terpengaruh pada keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Untuk dapat diketahui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional norma entitas; dan
- d. Diperoleh atas dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila aset tetap diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaan berpindah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis Pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan disisi lain kewajiban dicatat sebagai nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebagai nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- e. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam diakui, pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Ekuitas dana lancar dicatat sebagai selisih antar aset lancar dan kewajiban jangka pendek, ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan, hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Aset tetap belum dilakukan penyusutan karena, hal ini belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

3. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selama tahun 2019, yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Pontianak berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran keseluruhan setelah perubahan sebesar Rp. **15.340.985.340,-** yang terdiri dari *Belanja Tidak Langsung* sebesar Rp. 3.484.364.000,- dan *Belanja Langsung* sebesar Rp 11.856.621.340,-. Untuk melihat lebih jelas pos –pos pendapatan, belanja, aset dan persediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Pendapatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak mengelola pendapatan sehingga laporan keuangan pada tahun 2018 tidak ada anggaran dan realisasi. Untuk melihat pos – pos pendapatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak di tampilkan pada tabel di bawah ini .

Tabel. 8

Laporan Pos Pendapatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	2019	2018	Kenaikan	%
				(Penurunan)	
1	PENDAPATAN				
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
7	Lain-lain PAD Yang Sah	0	0	0	0
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0

5.2. Belanja

Dalam struktur belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengelola anggaran belanja berdasarkan LRA pada pos – pos belanja sebagai berikut :

5.2.1 Belanja Oprasional

Pada tahun anggaran 2019 belaja Operasional sebesar Rp. 11.577.937.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.843.222.259,- atau 85,02%. Belanja operasional ini terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) *Belanja Pegawai* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 3.623.308.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.182.247.513,- atau 87,83% pada pos belanja pegawai ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

2) *Belanja Barang dan Jasa* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak pada tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.954.665.460,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.660.974.746,- atau 83,74%. Pada pos belanja barang dan jasa terdiri dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Belanja Hadiah

Untuk melihat perkembangan pos – pos belanja oprasional dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 9

Belanja Operasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
51	BELANJA OPERASI	11.577.937.860	9.843.222.259	1.734.715.601	85,02
511	Belanja Pegawai	3.623.308.400	3.182.247.513	441.060.887	87.83
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.161.000.000	1.957.937.513	203.062.487	90.60
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.620.000.000	1.506.165.768	113.834.232	92.97
5110102	Tunjangan Keluarga	150.000.000	127.222.906	22.777.094	84.82
5110103	Tunjangan Jabatan	160.000.000	152.590.000	7.410.000	95.37
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	50.000.000	42.155.000	7.845.000	84.31

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5110106	Tunjangan Beras	80.000.000	68.364.480	11.635.520	85.46
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000	7.249.990	12.750.010	36.25
5110108	Pembulatan Gaji	1.000.000	23.029	976.971	2.30
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	50.000.000	41.827.257	8.172.743	83.65
5110121	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000	3.084.753	6.915.247	30.85
5110122	Jaminan Kematian	20.000.000	9.254.330	10.745.670	46.27
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.323.364.000	1.124.021.000	199.343.000	84.94
5110205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.033.498.000	878.065.000	155.433.000	84.96
5110208	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	289.866.000	245.956.000	43.910.000	84.85
51107	Uang Lembur	138.944.400	100.289.000	38.655.400	72.18
5110701	Uang Lembur PNS	118.944.400	81.171.000	37.773.400	68.24
5110702	Uang Lembur Non PNS	20.000.000	19.118.000	882.000	95.59
512	Belanja Barang dan Jasa	7.954.665.460	6.660.974.746	1.293.690.714	83.74
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	448.248.540	312.511.564	135.736.976	69.72
5120101	Belanja alat tulis kantor	231.735.820	210.227.600	21.508.220	90.72
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar. battery	112.000.000	21.897.564	90.102.436	19.55

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	kering)				
5120104	Belanja peranko. materai dan benda pos lainnya	19.300.000	15.476.000	3.824.000	80.19
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.913.120	23.136.400	1.676.720	92.87
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.849.600	4.867.000	13.982.600	25,82
5120112	Belanja Souvenir / Plakat/Tropi	41.550.000	36.907.000	4.643.000	88.83
51203	Belanja Jasa Kantor	1.759.615.000	1.342.316.240	417.298.760	76.29
5120305	Belanja surat kabar/majalah	9.213.600	8.930.000	283.600	96.92
5120306	Belanja kawat/faksimili/ internet	1.235.530.400	1.068.551.965	166.978.435	86.49
5120312	Belanja Transportasi dan Akomodasi	70.456.000	18.906.275	51.549.725	26.83
5120313	Belanja Dokumentasi	15.200.000	0	15.200.000	0.00
5120314	Belanja Dekorasi	54.750.000	29.405.000	25.345.000	53.71
5120318	Belanja kerjasama dengan mess media	104.500.000	44.600.000	59.900.000	42.68
5120323	Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli	205.657.000	117.515.000	88.142.000	57.14
5120324	Belanja Jasa Kebersihan	35.750.000	35.750.000	0	100,0
5120340	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	28.558.000	18.658.000	9.900.000	65.33

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
51204	Belanja Premi Asuransi	410.321.920	407.053.968	3.267.952	99.20
5120401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.604.000	11.019.600	584.400	94.96
5120404	Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan	16.357.920	15.574.368	783.552	95.21
5120418	Belanja Jasa Tenaga IT (Informasi Teknologi)	382.360.000	380.460.000	1.900.000	99.50
51205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.754.000	282.817.150	110.936.850	63.10
5120601	Belanja cetak	293.484.000	234.232.100	59.251.900	79.81
5120602	Belanja Penggandaan	100.270.000	48.585.050	51.684.950	48.45
51207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	20.000.000	13.500.000	6.500.000	92.10
5120702	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000	13.500.000	6.500.000	67.50
51210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000	0	27.500.000	0.00
5121009	Sewa Bandwidth Internet dan	27.500.000	0	27.500.000	0.00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Intranet				
51211	Belanja Makanan dan Minuman	432.140.000	338.512.000	93.628.000	78.33
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	40.160.000	33.759.000	6.401.000	84.06
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	21.000.000	15.500.000	5.500.000	73.81
5121104	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.160.000	24.250.000	8.910.000	73.13
5121105	Belanja makanan dan minuman kegiatan	337.820.000	265.003.000	72.817.000	78.45
51212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.200.000	37.076.000	124.000	99.67
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.200.000	37.076.000	124.000	99.67
51213	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000	6.578.000	5.422.000	54.82
5121301	Belanja pakaian kerja lapangan	12.000.000	6.578.000	5.422.000	54.82
51215	Belanja Perjalanan Dinas	324.000.000	292.801.424	31.198.576	90.37
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000	4.630.000	370.000	92.60
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	319.000.000	288.171.424	30.828.576	90.51
51218	Belanja Pemeliharaan	299.956.000	146.756.400	153.199.600	48.93
5121802	Belanja Pemeliharaan	249.956.000	97.245.400	152.710.600	38.91

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Peralatan dan Mesin				
5121803	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.511.000	489.000	99.02
51219	Belanja Jasa Konsultansi	673.020.000	587.482.000	85.538.000	87.29
5121902	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	199.490.000	195.973.000	3.517.000	98.24
5121904	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Komputerisasi	218.770.000	207.965.000	10.805.000	95.06
5121906	Belanja Jasa Event Organizer	254.760.000	183.544.000	71.216.000	72.05
51223	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000	22.300.000	27.700.000	44.60
5122301	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	20.000.000	2.300.000	17.700.000	11.50
5122303	Belanja bimbingan teknis	30.000.000	20.000.000	10.000.000	66.67
51225	Honorarium PNS	3.026.410.000	2.830.770.000	195.640.000	93.54
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.145.220.000	1.999.570.000	145.650.000	93.21
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	46.740.000	41.140.000	5.600.000	88.02
5122505	Honor Pengelola Keuangan	354.620.000	348.040.000	6.580.000	98.14

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5122506	Honorarium Pengelola Kegiatan	303.630.000	269.720.000	33.910.000	88.83
5122507	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang	18.000.000	18.000.000	0	100
5122508	Honorarium Pengelola Website / Sistem Informasi berbasis Internet	158.200.000	154.300.000	3.900.000	97.53
51231	Belanja Hadiah	40.500.000	40.500.000	0	100
5123101	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	40.500.000	40.500.000	0	100

5.2.2 Belanja Modal

Dalam pos belanja Modal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak belanja modal di anggarkan sebesar Rp. 3.763.011.480.- dan terealisasi sebesar Rp. 3.459.910.860.- atau 91,95%. Dalam laporan LRA tahun 2019 belanja modal terdiri dari pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Lainnya. Untuk melihat lebih jelas pos – pos pada belanja modal dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak pada tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.969.191.480.- dan terealisasi sebesar Rp. 2.714.981.460,- atau 91.44%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari pos – pos Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu, Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin, Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor, Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga, Belanja modal Pengadaan Komputer, Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dan Belanja modal Pengadaan Alat Studio, Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi, dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar.

- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dalam pos ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menganggarkan sebesar Rp. 210.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 209.475.000,- atau 99,66%. Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dengan melakukan peningkatan ruangan untuk penyimpanan server E-Government Kota Pontianak/ Data Center Kota Pontianak.
- 3) Belanja Modal Aset Lainnya, dalam pos ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menganggarkan sebesar Rp. 583.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 535.454.400,- atau 91.75%. Pos Belanja Modal Aset Lainnya berupa Belanja modal Pengadaan Software.

Untuk melihat perkembangan pos belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 10

Belanja Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
52	BELANJA MODAL	3.763.011.480	3.459.910.860	303.100.620	93,40
522	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	2.969.191.480	2.714.981.460	254.210.020	91,44
52203	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	2.000.000	2.000.000	0	100
5220303	Belanja modal Pengadaan Compressor	2.000.000	2.000.000	0	100
52204	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	261.150.000	257.600.000	3.550.000	98,64

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5220401	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	236.150.000	233.600.000	2.550.000	98,92
5220405	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000	24.000.000	1.000.000	96,00
52210	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	12.500.000	12.200.000	300.000	97,60
5221005	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	2.000.000	2.000.000	0	100
5221006	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	4.000.000	3.700.000	300.000	92,50
5221007	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	6.500.000	6.500.000	0	100
52211	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	3.300.000	3.300.000	0	100
5221109	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	3.300.000	3.300.000	0	100

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
52214	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	247.340.000	203.495.500	43.844.500	82,27
5221404	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	246.740.000	203.495.500	43.244.500	82,47
5221405	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	600.000	0	600.000	0,00
52215	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	246.260.000	217.819.000	28.441.000	88,45
5221501	Belanja modal Pengadaan Meubelair	79.120.000	78.240.000	880.000	98,89
5221503	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000	4.090.000	910.000	81,80

5221504	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	148.140.000	123.070.000	25.070.000	83,08
5221506	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.000.000	12.419.000	1.581.000	88,71
52216	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.574.401.480	1.472.716.060	101.685.420	89,50
5221601	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	14.000.000	12.830.000	1.170.000	91,64
5221604	Belanja modal Pengadaan	123.245.000	97.195.000	26.050.000	78,86

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Peralatan Personal Komputer				
5221605	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	985.156.000	938.611.700	46.544.300	95,28
5221606	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	452.000.480	424.079.360	27.921.120	93,82
52217	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000	19.315.200	684.800	96,58
5221701	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000	19.513.200	684.800	96,58
5221706	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0,00	0,00	0,00	0
52218	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	569.740.000	497.797.000	71.943.000	87,37
5221801	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	59.000.000	11.900.000	47.100.000	20,17
5221802	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	445.740.000	433.663.000	12.077.000	97,29

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5221803	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	65.000.000	52.234.000	12.766.000	80,36
52219	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000	19.200.000	800.000	96,00
5221901	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	20.000.000	19.200.000	800.000	96,00
52220	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	12.500.000	9.538.700	2.961.300	76,31
5222019	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena	12.500.000	9.538.700	2.961.300	76,31
523	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	210.200.000	209.475.000	725.000	99,66
52301	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.200.000	209.475.000	725.000	99,66
5230104	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	210.200.000	209.475.000	725.000	99,66
526	<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>	583.620.000	535.454.400	48.165.600	91,75
52601	Belanja modal Pengadaan	583.620.000	535.454.400	48.165.600	91,75

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Software				
5260101	Belanja Modal software	583.620.000	535.454.400	48.165.600	91,75

5.3. Neraca

Dalam laporan keuangan neraca menjadi salah satu laporan yang wajib untuk di tampilkan, karena di dalam neraca terdapat Aset, Kewajiban dan Ekuitas. untuk melihat neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019. Penjelasan perkembangan neraca tahun 2019 yang mengalami perubahan dari tahun 2018 terjadi pada pos sebagai berikut :

1. Aset Lancar pada Beban Dibayar Dimuka senilai Rp. 1.870.753,42 yang merupakan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bermotor roda 2 yang dibayarkan pada tahun 2019.
2. Aset Lancar pada Persediaan Bahan/Material belum terjadi perubahan yang semula pada tahun 2018 sebesar Rp. 134.479.075 masih dengan nilai yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp. 134.479.075,-. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan aset oleh Pemerintah Kota Pontianak kepada DANDIM Kota Pontianak sebesar Rp. 134.479.075,-.
3. Total Aset Lancar tahun 2019 adalah sebesar Rp. 136.349.828,42.
4. Aset tetap peralatan dan mesin dalam tahun 2019 terjadi perubahan sebesar Rp. 8.966.694.735,67 dari tahun 2018 sebesar Rp. 6.325.586.275,67, peningkatan ini disebabkan adanya perubahan penambahan nilai pada alat bengkel tak bermesin, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, alat komunikasi dan peralatan pemancar yang sejalan dengan adanya pergerakan penambahan nilai belanja aset tetap.
5. Aset tetap gedung dan bangunan dengan nilai tahun 2019 sebesar Rp. 6.454.922.000,00,- yang terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp. 6.406.494.000,00 dan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung senilai Rp. 48.428.000,-. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.173.819.000,- yang terdiri dari bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 6.125.391.000,- dan bangunan menara sebesar Rp. 48.428.000,-.
6. Aset tetap pada akumulasi penyusutan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. -8.435.647.928,02 yang terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. -5.528.213.043,59 dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. -2.907.434.884,43, peningkatan akumulasi penyusutan tahun 2018 disebabkan adanya kenaikan nilai aset peralatan dan mesin serta aset gedung dan bangunan.
7. Aset Lainnya pada aset tak berwujud lainnya dengan nilai sebesar Rp. 1.769.350.925,00 dengan amortisasi aset tak berwujud Rp. -

803.120.618,75, peningkatan ini disebabkan adanya penambahan aset tak berwujud berupa aplikasi e-government yang di kelola oleh Diskominfo Kota Pontianak. Untuk asset lain-lain senilai Rp. 21.497.500,00 sehingga total Aset lainnya sebesar Rp. 966.730.306,25.

8. Kewajiban pada utang belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 86.066.000,00 utang belanja pegawai ini di sebabkan adanya tambahan penghasilan atas prestasi kerja berupa kesejahteraan pegawai (kespeg) serta insentif dan makan dan minum pada bulan Desember sebagaimana dapat dilihat pada lampiran. Selain itu juga terdapat utang pembayaran belanja jasa kantor (Belanja kawat/internet/faximilie) untuk bulan desember 2019 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 3.488.700,00-.
9. Ekuitas tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.999.494.242,32 yang terdiri dari ekuitas sebesar Rp. -5.240.250.176,68 dan RK PPKD sebesar Rp. 25.697.120.726,00 peningkatan ekuitas ini, sejalan dengan adanya perkembangan peningkatan anggaran dari tahun 2018 dan 2019.

Dari penjelasan pos – pos aset di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah aset dalam satu tahun anggaran. untuk melihat perkembangan neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran dan table 11 di bawah ini.

Tabel. 11

Neraca

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	2019	2018
1	2	3	4
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	59.900.000,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	-	59.900.000,00
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka		
	Beban Jasa Dibayar Dimuka	1.870.753,42	-

NO	URAIAN			2019	2018
1	2			3	4
			Jumlah Beban Dibayar Dimuka	1.870.753.42	
1.1.7			Persediaan		
1.1.7.2			Persediaan Bahan/Material	134.479.075,00	134.479.075,00
			Jumlah Persediaan	134.479.075,00	134.479.075,00
			Jumlah Aset Lancar	136.349.828,42	194.379.075,00
1.2.			ASET TETAP		
1.2.2			Peralatan dan Mesin		
1.2.2.3			Alat-alat Bantu	4.500.000,00	
1.2.2.4			Alat Angkutan Darat Bermotor	257.600.000,00	
1.2.2.10			Alat Bengkel Tak Bermesin	9.700.000,00	
1.2.2.11			Alat Ukur	4.300.000,00	
1.2.2.14			Alat Kantor	1.361.099.619,35	1.107.110.117,35
1.2.2.15			Alat Rumah Tangga	1.739.171.654,52	1.553.905.648,52
1.2.2.16			Komputer	4.617.257.872,00	3.327.446.812,00
1.2.2.17			Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	318.376.389,80	245.997.997,80
1.2.2.18			Alat Studio	607.334.500,00	72.509.700,00
1.2.2.19			Alat Komunikasi	23.100.000,00	3.900.000,00
1.2.2.20			Peralatan Pemancar	24.254.700,00	14.716.000,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin	8.966.694.735,67	6.325.586.275,67
1.2.3			Gedung dan Bangunan		
1.2.3.1			Bangunan Gedung		

NO	URAIAN			2019	2018
1	2			3	4
			Tempat Kerja	6.406.494.000,00	6.125.391.000,00
1.2.3.3			Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	48.428.000,00	48.428.000,00
			Jumlah Gedung dan Bangunan	6.454.922.000,00	6.173.819.000,00
1.2.7			Akumulasi Penyusutan		
1.2.7.1			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 5.528.213.043,59	- 3.845.877.292,73
1.2.7.2			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 2.907.434.884,43	- 2.728.982.038,66
1.2.7.3			Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	-	-
			Jumlah Akumulasi Penyusutan	-8.435.647.928,02	-6.574.859.331,39
			Jumlah Aset Tetap	6.985.968.807,65	5.924.545.944,28
1.3			ASET LAINNYA		
1.3.3			Aset Tidak Berwujud		
1.3.3.5			Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.769.350.925,00	1.233.896.525,00
1.3.3.6			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 803.120.618,75	- 360.782.887,50
			Jumlah Aset Tidak Berwujud	966.230.306,25	873.113.637,50
1.3.4			Aset Lain-lain		
			Aset Lain-lain	21.497.500,00	21.497.500,00
			Jumlah Lain-lain	21.497.500,00	21.497.500,00

NO	URAIAN				2019	2018
1	2				3	4
				Jumlah Aset Lainnya	966.730.306,25	873.613.637,50
	JUMLAH ASET				8.089.048.942,32	6.992.538.656,78
2	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.3	Utang Belanja					
2.1.3.1				Utang Belanja Pegawai	86.066.000,00	62.008.000,00
2.1.3.2				Utang Belanja Barang dan Jasa	3.488.700,00	-
				Jumlah Utang Belanja	89.554.700,00	62.008.000,00
				Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	89.554.700,00	62.008.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN				89.554.700,00	62.008.000,00
3	EKUITAS					
				Ekuitas	-	-
					5.240.250.176,68	5.523.356.950,22
				RK PPKD	25.697.120.726,00	12.453.887.607,00
	JUMLAH EKUITAS				7.999.492.242,32	6.930.530.656,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				8.089.048.942,32	6.992.538.656,78

5.4. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam anggaran tahun 2019 Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan ekuitas awal sebesar Rp. 6.930.530.656,78 dengan surplus/deficit-LO

sebesar Rp. -12.170.780.833,44 serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,- dan selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0,- serta lain – lain Rp.-0.02 dengan RK PPKD sebesar Rp. 13.243.233.119,00 jadi akuntabilitas akhir sebesar Rp. 7.999.494.242,32 Untuk lebih jelas melihat LPE tahun 2019 per 31 Desember sebagaimana di tampilkan pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel. 12

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	2019	2018
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	6.930.530.656,78	2.057.603.300,01
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	- 12.170.780.833,44	- 10.953.078.479,37
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	197.423.492,36
6	LAIN LAIN	-0,02	3.174.694.736,78
7	RK PPKD	13.243.233.119,00	12.453.887.607,00
8	EKUITAS AKHIR	7.999.494.242,32	6.930.530.656,78

5.5. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam anggaran tahun 2019 persediaan barang atau perlengkapan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan persediaan awal sebesar Rp. 134.479.075,- yang terdiri dari :

1. Bahan Pakai Habis, terdiri dari ATK berdasarkan pengeluaran Simbada sebesar Rp. 0,- dan Alat listrik pengeluaran Simbada sebesar Rp. 0,- Benda Pos penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-, Alat Kebersihan penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-, BBM penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,- dan BHP Medis penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-.
2. Material/Bahan yang terdiri dari Bahan Baku Bangunan penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-, Obat-obatan penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-, Bahan Kimia penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-, Bahan/Bibit Tanaman penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,- dan bibit ternak penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-.
3. Bahan Cetakan, dalam tahun 2019 penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-
4. Bahan Makanan Pokok, dalam laporan persediaan tidak terdapat nilai persediaan atau sama dengan nilai Rp. 0,-.
5. Plakat/Souvenir pada persediaan awal tahun 2019 Bahan Cetakan, dalam tahun 2019 penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 0,-
6. Bahan Makanan Pokok, dalam laporan persediaan tidak terdapat nilai persediaan atau sama dengan nilai Rp. 0,-.
7. Untuk lain-lain, pada awal tahun 2019 dalam pos persediaan material/bahan terdapat persediaan Rp. 134.479.075,00 yang merupakan asset yang diserahkan kepada pihak ketiga (KODIM) sejak tahun 2018 yang masih belum terjadi perubahan pencatatan.

Tabel. 13

Laporan Persediaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Per 31 Desember 2019

No.	Persediaan	Persediaan Awal Tahun 2019 (Saldo Awal)	Penerimaan		Pengeluaran SIMBADAk	Sisa Persediaan (Per 31-12-2019)	Ket
			APBD				
			Kegiatan	Rutin			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bahan Pakai Habis						
	- ATK	0.00	127.567.100.00	82.660.500,00	210.227.600,00	0.00	
	- Alat Listrik	0.00	13.132.664.00	8.764.900.00	21.897.564,00	0.00	
	- Suku Cadang Elektromedik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Benda Pos	0.00	9.231.000.00	6.245.000.00	15.476.000,00	0.00	
	- Alat	0.00	0.00	23.136.400,00	23.136.400,00	0.00	

	Kebersihan						
	- BBM	0.00	0.00	4.867.000.00	4.867.000.00	0.00	
	- BHP Medis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Material / Bahan				0.00	0.00	
	- Bahan Baku Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Obat - Obatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Bahan Kimia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Bahan / Bibit Tanaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Bibit Ternak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Bahan Cetakan	0.00	211.962.100.00	22.270.000,00	234.232.100,00	0.00	
4	Bahan Makanan Pokok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Plakat / Souvenir	0.00	36.907.000.00	0.00	36.907.000,00	0.00	
6	Lain - Lain	134.479.075,-	0.00	0.00	0.00	134.479.075,00	
	JUMLAH	134.479.075,-	398.799.864.00	147.943.800,00	46.743.664,00	134.479.075,00	

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menyediakan aplikasi JEPIN adalah salah satu fitur aplikasi yang memungkinkan masyarakat Kota Pontianak untuk mendapatkan segala informasi terkait Kota Pontianak. Bisa melalui Ponsel atau komputernya. Ia berada dalam sebuah aplikasi bernama JEPIN yang bisa diunduh lewat playstore ataupun app store secara cuma-cuma.

Pemerintah Kota Pontianak yang dalam visi kedepannya sebagai Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Publik lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk sebagai satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Informasi. Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing- masing bidang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi Komunikasi dan Persandian, Bidang Statistik Sektoral serta Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik kota pontianak berbasis e-government dengan sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

- Ruang Kerja
- Ruang Pontive Center
- Kursi Tamu
- Buku Tamu

- Komputer. TV. Mesin Fax. Telepon dll.
- Ruang Laktasi
- Ruang Rapat

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai berikut :
 “Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak Berbasis E-Government”

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan profesionalisme birokrasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informatika;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

Moto pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah
 “CEPAT. MUDAH DAN TRANSPARAN” dengan mengandung makna sebagai berikut :

1. CEPAT : Segala pelayanan informasi, komunikasi dan statistik di Kota Pontianak harus lebih *CEPAT* dalam mengakses pelayanan di segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. MUDAH : Bagi masyarakat dalam mengakses informasi layanan pengaduan lebih *MUDAH* di akses oleh masyarakat;
3. TRANSPARAN : dalam menyajikan data informasi kemasyarakatan lebih *TRANSPARAN* dan dapat di pertanggungjawabkan.

Standar pelayanan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebanyak 8 (delapan) jenis yang terdiri dari :

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat/ Lapor Warga Secara Online (e-LAWAR)
2. Pelayanan Verifikasi Penyedia
3. Pelayanan Permintaan Data
4. Pelayanan Rekomendasi Menara Telekomunikasi
5. Pelayanan Rekomendasi Jasa Titipan
6. Pelayanan Rekomendasi Radio Siaran Swasta
7. Pelayanan Rekomendasi Warung Internet (Warnet)
8. Pelayanan Tamu

BAB VII

P E N U T U P

Berdasarkan uraian diatas. maka Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan Anggaran dalam DPA Tahun 2019 setelah perubahan dengan total pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.484.364.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.081.958.513,- atau 88,45% dan untuk Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.856.621.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.221.174.606,- atau 86,21% serta dengan total seluruh belanja langsung dan tak langsung sebesar Rp 15.340.985.340,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 13.303.133.119,00 atau 86,71%..
2. Pendapatan berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak mengelola pendapatan sehingga laporan LRA pada tahun 2019 sehingga pendapatan pada kolom anggaran dan realisasi sebesar Rp. 0.-
3. **Belanja**, dalam LRA tahun 2019 pada pos belanja terbagi menjadi dua jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja Operasi terdiri dari (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) dengan total anggaran belanja oprasional sebesar Rp. 11.577.973.860,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.843.222.259,- atau 85,01%.; 2) Belanja Modal yang terdiri dari (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Lainnya) total belanja modal dengan anggaran sebesar Rp. 3.763.011.480,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.459.910.860,- atau 91,95%.
4. **Beban**, Beban, dalam laporan oprasional tahun 2019 pada pos beban terbagi menjadi tiga jenis sub beban yang terdiri dari : 1) Beban Operasi dengan total anggaran sebesar Rp. 12.170.780.833,44, yang terdiri dari Beban Pegawai dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.206.305.513,00 dan Beban Barang dan Jasa dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 6.659.103.992,58 dan untuk Beban Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Penyusutan sebesar Rp. 2.303.126.327,86. Penyisihan Piutang dan lain -lain tidak terdapat anggaran atau Rp. 0,- dan untuk tahun 2018 jika di bandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan belanja Operasional dengan total kenaikan sebesar Rp. 1.212.327.979,07 atau 111,06. 2) Surplus non operasional tahun 2019 yang terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dalam laporan oprasional tahun 2019 tidak terdapat jumlah surplus non oprasional. 3). Defisit Non Operasional dalam laporan oprasional terdapat 3 (tiga) pos yant terdiri dari pos Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dari ketiga pos tersebut tidak terdapat jumlah Defisit Non Operasional sebesar Rp. 0,-.
5. Penjelasan perkembangan neraca tahun 2019 yang mengalami perubahan dari tahun 2018 **terjadi** pada pos sebagai berikut :
 - a. Aset Lancar pada Beban Dibayar Dimuka senilai Rp. 1.870.753,42 yang merupakan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bermotor roda 2 yang dibayarkan pada tahun 2019.

- b. Aset Lancar pada Persediaan Bahan/Material belum terjadi perubahan yang semula pada tahun 2018 sebesar Rp. 134.479.075 masih dengan nilai yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp. 134.479.075,-. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan aset oleh Pemerintah Kota Pontianak kepada DANDIM Kota Pontianak sebesar Rp. 134.479.075,.
- c. Total Aset Lancar tahun 2019 adalah sebesar Rp. 136.349.828,42.
- d. Aset tetap peralatan dan mesin dalam tahun 2019 terjadi perubahan sebesar Rp. 8.966.694.735,67 dari tahun 2018 sebesar Rp. 6.325.586.275,67, peningkatan ini disebabkan adanya perubahan penambahan nilai pada alat bengkel tak bermesin, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, alat komunikasi dan peralatan pemancar yang sejalan dengan adanya pergerakan penambahan nilai belanja asset tetap.
- e. Aset tetap gedung dan bangunan dengan nilai tahun 2019 sebesar Rp. 6.454.922.000,00,- yang terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp. 6.406.494.000,00 dan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung senilai Rp. 48.428.000,-. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.173.819.000,- yang terdiri dari bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 6.125.391.000,- dan bangunan menara sebesar Rp. 48.428.000,-.
- f. Aset tetap pada akumulasi penyusutan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. -8.435.647.928,02 yang terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. -5.528.213.043,59 dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. -2.907.434.884,43, peningkatan akumulasi penyusutan tahun 2018 disebabkan adanya kenaikan nilai asset peralatan dan mesin serta asset gedung dan bangunan.
- g. Aset Lainnya pada asset tak berwujud lainnya dengan nilai sebesar Rp. 1.769.350.925,00 dengan amortisasi asset tak berwujud Rp. -803.120.618,75, peningkatan ini disebabkan adanya penambahan asset tak berwujud berupa aplikasi e-government yang di kelola oleh Diskominfo Kota Pontianak. Untuk asset lain-lain senilai Rp. 21.497.500,00 sehingga total Aset lainnya sebesar Rp. 966.730.306,25.
- h. Kewajiban pada utang belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 86.066.000,00 utang belanja pegawai ini di sebabkan adanya tambahan penghasilan atas prestasi kerja berupa kesejahteraan pegawai (kespeg) serta insentif dan makan dan minum pada bulan Desember sebagaimana dapat dilihat pada lampiran. Selain itu juga terdapat utang pembayaran belanja jasa kantor (Belanja kawat/internet/faximilie) untuk bulan desember 2019 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 3.488.700,00,-.
- i. Ekuitas tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.999.494.242,32 yang terdiri dari ekuitas sebesar Rp. -

5.240.250.176,68 dan RK PPKD sebesar Rp. 25.697.120.726,00 peningkatan ekuitas ini, sejalan dengan adanya perkembangan peningkatan anggaran dari tahun 2018 dan 2019.

6. **Kewajiban dan Ekuitas.** Dalam anggaran tahun 2019 Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan ekuitas awal sebesar Rp. 6.930.530.656,78 dengan surplus/deficit-LO sebesar Rp. -12.170.780.833,44 serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,- dan selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0,- serta lain – lain Rp.-0.02 dengan RK PPKD sebesar Rp. 13.243.233.119,00 jadi akuntabilitas akhir sebesar Rp. 7.999.494.242,32.
7. Sisa kas UYHD dari uang persediaan/ganti uang persediaan pada bendahara pengeluaran tahun Anggaran 2019 UP/GU sebesar Rp. 77.056.103,00 dan Sisa TU sebesar Rp. 4.750.000,00 dengan total Rp. 81.806.103,-.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019.

L A M P I R A N